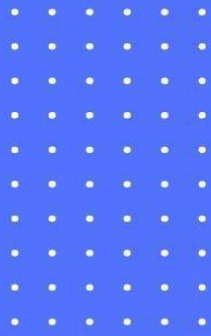




PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur

@dkp3a.kaltim

2023

Jl. Dewi Sartika No. 13 Telp. (0541) 747481
E-mail : dkp3akaltim1@gmail.com
Web : dkp3a.kaltimprov.go.id
SAMARINDA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmatNya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 ini telah dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DKP3A Provinsi Kalimantan Timur disusun sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 merupakan tahun terakhir bagi RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023, sehingga LKJIP pada tahun ini selain memuat capaian sasaran atas target-target yang telah dituangkan dalam dokumen penetapan kinerja pada awal tahun anggaran 2023, juga menyajikan capaian atas tujuan daerah, sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yaitu **“Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat”**. sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKJIP tahun 2023.

Samarinda, 1 Februari 2024

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Kalimantan Timur,



H. Nona Soravalita, SE, MMT

Rembina Utama Muda

NIP. 19651215 198601 2 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

➤ **Penyusunan Laporan**

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja mengukur ketercapaian kinerja berdasarkan Perjanjian kinerja, perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. LKJIP DKP3A Provinsi Kalimantan Timur menggambarkan tingkat kemampuan instansi dalam mencapai sasaran pembangunan sesuai visi, misi, tugas, fungsi serta tujuan yang berkorelasi dengan Tujuan, Visi Misi Pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur. Capaian terhadap sasaran pembangunan dilihat melalui capaian indikator kinerja, target dan realisasi serta seraoan anggaran yang dianalisa mendalam sehingga dapat menggambarkan proses kinerja, kendala yang dihadapi serta solusi yang dilakukan.

➤ **Pengukuran Kinerja**

Setelah dilakukan penyelarasan sesuai visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2019-2023 ditentukan isu strategis, indikator kinerja, capaian sasaran dan berbagai kegiatan. Untuk itu pembangunan 3 (tiga) urusan yaitu urusan pelayanan administrasi kependudukan, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana menetapkan 6 (enam) tujuan dan 6 (enam) sasaran. Keenam tujuan dan sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan indikator kinerja.

Ringkasan capaian Kinerja pelayanan dan anggaran Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur dikatakan berhasil dengan uraian sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Alokasi	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak terhadap kasus KDRT	90	100	111,12	4.557.400.000	4.087.991.010	89,70
2	Meningkatnya implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan (PPRG)	100	83,78	83,78	1.700.000.000	1.689.124.915	99,36
3	Meningkatnya layanan administrasi kependudukan	100	99,80	99,80	2.400.150.000	2.363.167.945	98,46
4	terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	2,50	1,65	66,00	3.358.200.000	3.270.279.878	97,38
5	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	50	65	130,00	694.400.000	681.069.384	98,30
6	Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparatur sipil negara serta sarana prasarana	100	96,20	96,20	18.858.685.247	17.217.134.520	91,30
Total					31.566.835.247	29.308.767.652	92,85

➤ Pemanfaatan Laporan

- Mengukur kinerja Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur dalam menunjang keberhasilan pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
- Penyempurnaan dokumen perencanaan pada periode yang akan datang
- Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang
- Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR LAMPIRAN	8
BAB I PENDAHULUAN	
A. Dasar Pembentukan Organisasi	9
B. Tugas dan Fungsi.....	9
C. Struktur Organisasi.....	11
D. Sumber Daya Manusia.....	12
E. Aspek Strategi Organisasi.....	13
F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)	15
G. Sarana dan Prasarana Kerja.....	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Perencanaan Strategis	19
B. Indikator Kinerja Utama	26
C. Perjanjian Kinerja	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun sebelumnya ...	32
B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	34
C. Analisis Capaian Kinerja	35
D. Capaian Kinerja Lainnya	59
E. Realisasi Anggaran	59
BAB IV PENUTUP	

DAFTAR TABEL

TABEL

1.1	Jumlah Pegawai DKP3A Menurut Jenis Kelamin, Golongan dan Pendidikan	13
1.2	Sarana dan Prasarana Di lingkungan DKP3A.....	18
2.1	Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja 5 Tahun	20
2.2	Program/Kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran.....	22
2.3	Indikator Kinerja Utama (IKU) DKP3A tahun 2019-2023.....	26
2.4	Indikator Perjanjian Kinerja (PK) DKP3A Tahun 2022	29
2.5	Target Belanja DKP3A Tahun 2022	30
2.6	Anggaran Per Sasaran Strategis	31
3.1	Anggaran Per Sasaran 2021	32
3.2	Tindak Lanjut hasil evaluasi Inspektorat	32
3.3	Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	34
3.4	Sasaran 1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja.....	35
3.5	Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	35
3.6	Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah	36
3.7	Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.....	36
3.8	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	37
3.9	Program/Kegiatan penunjang pencapaian sasaran	38
3.10	Sasaran 2 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja.....	38
3.11	Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	39
3.12	Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah	39
3.13	Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.....	40
3.14	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	41
3.15	Program/Kegiatan penunjang pencapaian sasaran	41
3.16	Sasaran 3 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja.....	42
3.17	Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	44
3.18	Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah	44



3.19	Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.....	45
3.20	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	46
3.21	Program/Kegiatan penunjang pencapaian sasaran	46
3.22	Sasaran 4 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja.....	47
3.23	Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	48
3.24	Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah	48
3.25	Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.....	49
3.26	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	50
3.27	Program/Kegiatan penunjang pencapaian sasaran	50
3.28	Sasaran 5 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja.....	51
3.29	Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	51
3.30	Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah	52
3.31	Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.....	52
3.32	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	53
3.33	Program/Kegiatan penunjang pencapaian sasaran	53
3.34	Sasaran 6 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja.....	54
3.35	Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	54
3.36	Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah	55
3.37	Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.....	55
3.38	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	56
3.39	Program/Kegiatan penunjang pencapaian sasaran	56
3.40	Pencapaian SDG's Tahun 2022	57
3.41	Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja	58
3.42	Realisasi anggaran per program kegiatan	59



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN

1. Capaian Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2022
2. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Terhadap Capaian Kinerja DKP3A
3. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra DKP3A Prov. Kaltim
4. Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2022
5. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DKP3A Tahun 2022
6. Cascading DKP3A

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Pembentukan DKP3A Provinsi mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tatakerja DKP3A Provinsi Kalimantan Timur.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Maka ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur melalui Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur

B. TUGAS DAN FUNGSI

Sebagai tindak lanjut Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka diterbitkanlah Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur.

Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Kependudukan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perlindungan perempuan dan perlindungan anak;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang sistem data gender dan anak;
- g. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kesetaraan gender;
- h. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- j. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kependudukan, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK dibidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya, untuk layanan rujukan lanjutan lintas daerah kabupaten/kota.

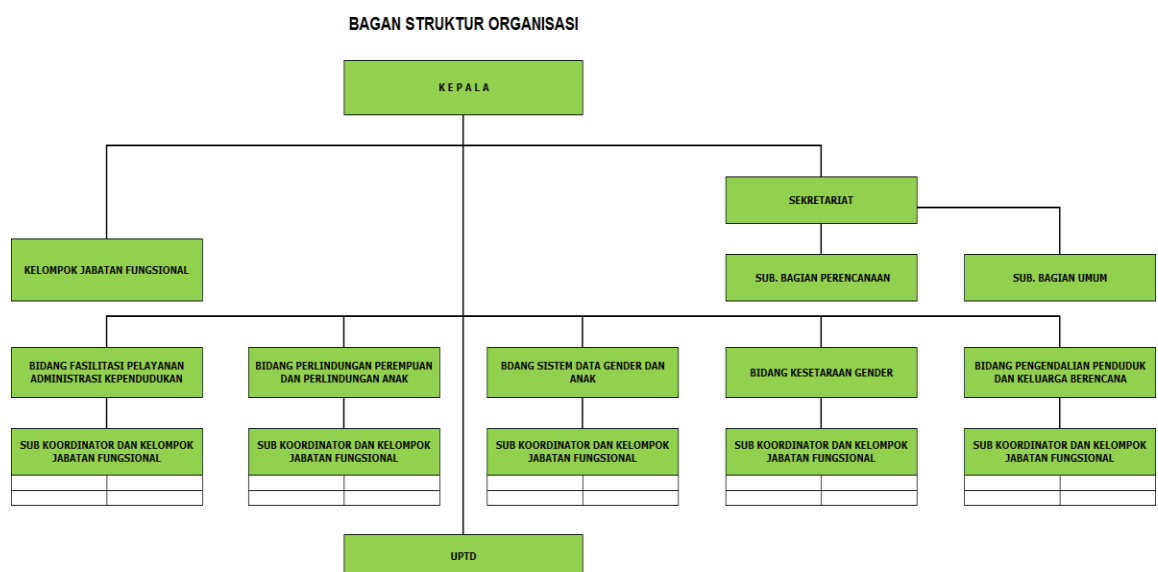
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 4, UPTD PPA, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis operasional pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang perencanaan, evaluasi dan perlindungan perempuan dan anak;
- c. Pemantuan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
- d. Penyusunan rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
- e. Pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan;
- f. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi merupakan komponen-komponen penyusun pemerintahan, yang memperjelas kedudukan setiap posisi, termasuk juga pembagian hak dan kewajiban atas pekerjaan di dalamnya. Dengan struktur ini, pekerjaan akan berjalan lebih optimal dan seorang atasan pun bisa memberikan tugas kepada bawahannya secara adil serta sesuai dengan kompetensi masing-masing. Seorang atasan pun juga memiliki tanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya.

Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 59 tahun 2016 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi DKP3A Provinsi Kalimantan Timur.



Gambar : Struktur Organisasi Dinas Kependudukan, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Berdasarkan Struktur Organisasi di atas, dapat digambarkan bahwa Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur membawahi :

a. **Sekretariat**

Terdiri dari Sub Bagian Umum dan Sub Bagian Perencanaan Program

b. **Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Terdiri dari Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;

c. **Bidang Kesetaraan Gender**

Terdiri dari subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;

d. **Bidang Sistem Informasi Data Gender dan Anak**

Terdiri dari subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

e. **Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Terdiri dari subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

f. **Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Terdiri dari subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional

g. **UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak**

D. SUMBER DAYA APARATUR

Pegawai di lingkungan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur berjumlah 70 orang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) 43 orang dan Non ASN 27. Pegawai ASN terdiri dari 23 orang Laki-Laki dan 20 orang Perempuan. Tingkat pendidikan pegawai merupakan sumber daya yang dimiliki organisasi, dengan memperhatikan tingkat pendidikan dan golongan pegawai mempermudah penempatan berdasarkan kebutuhan, kesesuaian tugas dan peran pegawai guna pencapaian kinerja secara efektif, efisien dengan memperhatikan pengembangan kompetensi setiap pegawai.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai DKP3A Menurut Jenis Kelamin, Golongan dan Pendidikan

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	L	P	IV	III	II	I	S-2	S-1	D-III	SLTA	SLTP	SD
Kepala Dinas	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Sekretaris	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Kepala Bidang	2	3	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-
Kepala UPTD	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Kasi/ Kasubbag	4	1	-	5	-	-	3	2	-	-	-	-
Fungsional Umum	7	8	-	16	-	-	6	9	-	-	-	-
Fungsional Tertentu	1	1	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-
Jlh PNS	24	21	16	27	2	-	17	23	2	3	-	-
Jlh Honor/PTT	16	12	-	-	-	-	1	20	-	5	-	-
Jlh PNS + Honor/PTT	40	33	16	27	2	-	18	43	2	8	-	-

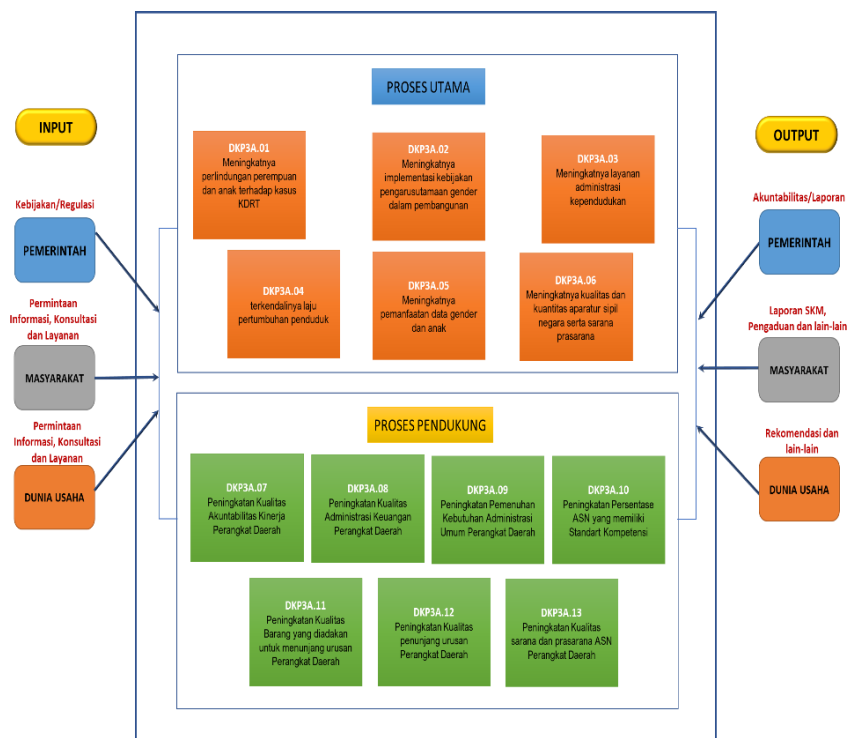
Keterangan : Data per 31 Desember 2022

E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Tugas dan Kewenangan Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur dalam mencapai Visi Gubernur Kalimantan Timur bertumpu pada Misi 1 yaitu **“Berdaulat dalam pembangunan Sumber daya manusia yang berahlak Mulia dan Berdaya saing terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas”** dengan **sasaran ke 4 yaitu “Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan”**. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut maka Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur merumuskan dalam sasaran strategis sesuai dengan urusan yang diampu.

Aspek strategis Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak provinsi Kalimantan timur dilakukan melalui identifikasi ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari tujuan organisasi, melalui analisis sasaran strategis dalam Renstra dan dijabarkan melalui Sasaran Strategis sebagai berikut:

- Sasaran 1 :** Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak terhadap kasus KDRT
Merumuskan persentase kasus korban kekerasan perempuan dan anak Provinsi Kaltim yang terselesaikan
- Sasaran 2 :** Meningkatnya implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan
Merumuskan Persentase Perangkat daerah yang menyusun anggaran dan perencanaan yang responsif gender
- Sasaran 3 :** Meningkatnya layanan administrasi kependudukan
Merumuskan Presentase penduduk yang mendapatkan layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil
- Sasaran 4 :** Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk
Merumuskan Laju pertumbuhan penduduk
- Sasaran 5 :** Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak
Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data gender
- Sasaran 6 :** Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparatur sipil negara serta sarana prasarana
persentase capaian kinerja aparatur sipil negara DKP3A



Gambar : Peta Proses Bisnis Dinas Kependudukan, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur

Analisis sasaran strategis Renstra Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur menjadi Proses Bisnis yang diuraikan menjadi proses utama, proses bisnis manajemen dan proses bisnis pendukung. Peta Poses Utama ini diambil dari Sasaran yang ingin dicapai melalui Renstra dalam setiap tahunnya sampai lima tahun mendatang.

F. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)

Permasalahan utama Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur dijabarkan dalam beberapa poin di bawah ini :

1. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:
 - Angka Harapan Hidup Perempuan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan angka harapan hidup laki-laki.
 - Indeks Pembangunan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
 - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.
 - Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.
 - Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki lebih tinggi dari pendapatan penduduk perempuan.
 - Pelaku usaha ekonomi perempuan kurang memiliki daya saing dalam menduduki kepemilikan usaha, sehingga untuk kepemilikannya diserahkan kepada suami/anak laki-lakinya.
 - Kurangnya minat dan kompetensi serta peluang perempuan untuk menempati jabatan yang lebih tinggi.
2. Permasalahan terkait Perlindungan Hak Perempuan:
 - Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.

- ✓ Perhitungan Data Korban Kekerasan sering terjadi tidak optimal karena terdapat kasus yang tidak dilaporkan, masyarakat masih enggan melaporkan karena menanggung aib keluarga, atau karena tidak mengetahui lembaga layanan.
 - ✓ Belum optimalnya fungsi lembaga layanan bagi perempuan penyandang disabilitas
 - ✓ Belum tersedianya data perempuan tenaga kerja korban kekerasan
 - Masih rentannya perempuan dan anak dari tindak pornografi dan kekerasan
 - Belum maksimalnya fungsi dan peran gugus tugas PTPPO serta belum optimalnya fungsi koordinasi antar OPD, instansi vertikal, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dll.
 - Belum optimalnya peran lembaga pemerhati perempuan dalam pemenuhan perlindungan hak perempuan.
3. Permasalahan terkait Perlindungan Anak:
- Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti perkawinan anak, anak jalanan dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)
 - Munculnya berbagai tindak kekerasan di media *online* seperti pornografi, pelecehan seksual, & penipuan terlihat dari kasus pornografidan *cyber crime*.
 - Kurangnya lembaga/organisasi yang mendukung aktualisasi dan pemenuhan Hak Anak.
 - Belum seluruh kabupaten kota memiliki Data Base tentang anak (anak putus sekolah, pekerja anak, dll)
 - Angka anak Putus sekolah yang cukup tinggi.
 - Belum sepenuhnya sistem perlindungan di provinsi dan kabupaten/kota berjalan dengan baik.
4. Permasalahan terkait Tumbuh Kembang Anak:
- Kurangnya pengetahuan/informasi tentang pengasuhan dan pembinaan keluarga yang aman. Hal ini dapat terlihat dari jumlah anak korban kekerasan.
 - Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak.

- Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak
 - Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.
 - Belum seluruh kabupaten kota memiliki Data Base tentang anak (anak putus sekolah, pekerja anak, dll)
 - Masih kurangnya tindak lanjut dari Komitmen pemerintah daerah, penentu kebijakan, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi dalam menuju Kota Layak Anak.
5. Permasalahan terkait Sistem Informasi Gender dan Anak.
- Data dan informasi yang ada tidak terpilah dan terupdate
 - Belum terbangunnya jaringan sistem informasi data gender dan anak
 - Masih kurangnya partisipasi OPD dalam menyediakan data gender dan anak.
 - Kurangnya tersedianya kelembagaan sistem informasi gender dan anak
6. Permasalahan terkait Pengendalian Penduduk dan KB
- Banyaknya penduduk yang migrasi ke Provinsi Kalimantan Timur untuk meningkatkan taraf hidup terbatas oleh kompetensi rawan menjadi kelompok marjinal
 - Adanya dampak Demografi penduduk berupa terbatasnya Pengembangan kapasitas sumberdaya penduduk, misalnya dalam pemenuhan pendidikan dan kesempatan kerja terutama bagi perempuan.
 - Kurangnya komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), khususnya pada program kegiatan calon pengantin dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga
 - Belum optimalnya lembaga masyarakat dalam pelaksanaan program KB
 - Tingginya angka perceraian di karenakan pendewasaan usia pernikahan pertama belum optimal.
7. Permasalahan terkait Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan
- Kurang optimalnya fungsi organisasi/lembaga penyedia data dalam penyediaan data terpilah atau data gender.
 - Kurang optimalnya pemanfaatan database kependudukan/profil kependudukan oleh stakeholder terkait

G. SARANA DAN PRASARANA

Sarana prasarana dan kondisinya yang dimiliki DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 selengkapnya tersaji pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana Di lingkungan DKP3A
Per 31 Desember 2022

No	Uraian	Banyaknya	Satuan
1	2	3	4
1	Tanah	4.213,67	m2
2	Gedung	3	Unit
	Gedung 1	1.440	m2
	Gedung 2		m2
	Gedung 3	48	m2
Mushola	36	m2	
3	Listrik	1	Jaringan
4	Air	1	Jaringan
5	Telepon	2	Jaringan
6	Area Parkir	2	Area
7	Ruang Rapat	1	Ruang
8	Ruang Arsip	1	Ruang
9	Aula	1	Ruang
10	Koperasi	-	-
11	Taman Dalam	-	-

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 tertuang dalam Renstra Perubahan tahun 2019-2024. Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 yang telah disusun dalam rentang waktu 1 (satu) tahun bertujuan untuk mewujudkan kinerja Output maupun Outcome, serta untuk mewujudkan manajemen pemerintahan efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil. Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Tahun 2022 dan melaporkannya dalam LKJIP, sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Perangkat Daerah.

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Pada Tahun 2022, Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan 6 (enam) Tujuan dan 6 (enam) Sasaran, sebagaimana tertuang dalam Dokumen Perubahan Renstra Tahun 2019-2023. Adapun Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target tercantum pada tabel di bawah ini:



Tabel 2.1
Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja 5 Tahun

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian s.d Th. 2018	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
							2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatkan upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak	Rasio KDRT	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak terhadap kasus KDRT	Persentase kasus korban kekerasan perempuan dan anak Provinsi Kaltim yang terselesaikan	%	-	72.00	74.00	78.00	89.00	90.00
2	Meningkatkan kesetaraan gender dalam berbagai bidang pembangunan di Kalimantan Timur	Persentase pelaku ekonomi perempuan Kaltim	Meningkatnya implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Persentase Perangkat daerah yang menyusun anggaran dan perencanaan yang responsif gender	%	25	55	60	65	85	100
3	Meningkatkan Pelayanan administrasi kependudukan yang lebih uptdate dan komprehensif	Peningkatan dokumen administrasi kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan	Meningkatnya layanan administrasi kependudukan	Persentase penduduk yang mendapatkan layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	%	95	97	98	99	100	100
4	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian dan Ketahanan Keluarga	Meningkatnya jumlah kampung KB	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	%	-	3.66	3.67	2.54	2.52	2.50
5	Meningkatkan ketersediaan data gender dan anak yang berkualitas	Peningkatan pemanfaatan data gender dan anak	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data gender	%	20	30	35	40	45	50
6	Meningkatkan layanan publik bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan KB	Persentase pencapaian kinerja DKP3A	Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparatur sipil negara serta sarana prasarana	persentase capaian kinerja aparatur sipil negara DKP3A	%	100	100	100	100	100	100

Tabel 2.2

Program/Kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak terhadap kasus KDRT	Persentase kasus korban kekerasan perempuan dan anak Provinsi Kaltim yang terselesaikan	%	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi
						Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
							Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
					PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
						Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
					PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi



No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
						Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi
						Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
						Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan Provinsi	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Provinsi
2	Meningkatkan kesetaraan gender dalam berbagai bidang pembangunan di Kalimantan Timur	Meningkatkan implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Persentase perangkat daerah yang menyusun anggaran dan perencanaan yang responsif gender	%	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
							Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi
							Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi
						Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi							



No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
						Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Advokai Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
3	Meningkatkan ketersediaan data gender dan anak yang berkualitas	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender	%	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi
4	Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih update dan komprehensif	Meningkatnya layanan administrasi kependudukan	persentase penduduk yang mendapatkan layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	%	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil
						Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional
					PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyusunan Tata Cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penyusunan pelaporan adminduk terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota



No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
5	Meningkatkan kesejahteraan, kemandirian dan ketahanan keluarga	terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	laju pertumbuhan penduduk	%	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
					PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK
							Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal
							Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi					
6	Meningkatkan layanan publik bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparatur sipil negara serta sarana dan prasarana	persentase capaian kinerja aparatur sipil negara DKP3A	%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					



No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
	anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
							Fasilitasi Kunjungan Tamu
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
							Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) DKP3A tahun 2019-2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan (Formulasi Penghitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak terhadap kasus KDRT	Persentase kasus korban kekerasan perempuan dan anak Provinsi Kaltim yang terselesaikan	%	<p>Kekerasan perempuan dan anak Kaltim cenderung meningkat, maka diperlukan strategi dalam pencegahan pelayanan agar angka kekerasan dapat berkurang. Berdasarkan Sistem Informasi On Line perlindungan perempuan dan anak se Kaltim, pada tiga tahun terakhir mengalami turun naik dari 406, 722 dan 287. Walaupun di tahun 2018 menggambarkan adanya penurunan kasus, namun hal tersebut masih menggambarkan adanya pelanggaran hak atas perempuan dan anak, dan perlu mendapatkan layanan terpadu bagi korban kekerasan</p> <p>Formulasi Penghitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah KDRT}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100$	DKP3A Prov. Kaltim (Simfoni PPA dan Data Kependudukan)	DKP3A Prov. Kaltim



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan (Formulasi Penghitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Meningkatnya implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan (PPRG)	Persentase Perangkat daerah yang menyusun anggaran dan perencanaan yang responsif gender	%	<p>Pengarusutamaan Gender (PUG) diharapkan akan mendorong peningkatan kualitas kesetaraan dan keadilan gender, yang diukur melalui capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kalimantan Timur. Pencapaian pembangunan manusia Provinsi Kalimantan Timur yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mampu mencapai indeks yang cukup tinggi ditingkat Nasional. Sejak tahun 2010 hingga 2019, IPM Provinsi Kalimantan Timur berada diatas angka nasional dengan menduduki rangking ke-3 besar, namun unntuk pencapaian pembangunan manusia berbasis pemberdaaan dan pembangunan gender belum sebaik capaian IPM, menurut data KPPA 2018 rangking IPG Kalimantan Timur di tingkat nasional pada tahun 2018 berada diperingkat ke-31 dari 34 Provinsi</p> <p>Formulasi Penghitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah berbasis ARG}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah Kaltim}} \times 100$	DKP3A Prov. Kaltim (Data Bidang KG)	DKP3A Prov. Kaltim
3	Meningkatnya layanan administrasi kependudukan	Persentase penduduk yang mendapatkan layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	%	<p>Data base kependudukan menggambarkan layanan administrasi kependudukan yang telah dilaksanakan untuk masyarakat meliputi kepemilikan Kartu Keluarga , akte, E-KTP, Kartu Identitas Anak, dll. Ketersediaan administrasi kependudukan sangat diperlukan oleh masyarakat guna mendapatkan kemudahan berbagai layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dll yang diharapkan mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan keluarga</p> <p>Formulasi Penghitungan :</p> $\frac{\text{Penduduk yang mendapatkan layanan}}{\text{jumlah penduduk}} \times 100$	DKP3A Prov. Kaltim (Data Kependudukan)	DKP3A Prov. Kaltim



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan (Formulasi Penghitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	%	<p>Adanya kesenjangan yang sangat signifikan antara jumlah desa di Kaltim dengan jumlah PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana) yang memiliki wawasan/pemahaman tentang keluarga secara kholistik dan Responsif gender yang tersedia di Kab/Kota sebagai ujung tombak pengendalian penduduk di daerah</p> <p>Formulasi Penghitungan :</p> $Pt = Po + (B - D) + (Mi - Mo)$ <p>Pt = Jumlah Penduduk Pada Tahun Ket Po = Jumlah Penduduk Pada Tahun Dasar B (birth) = Jumlah Kelahiran Selama Periode 0-t D (death) = Jumlah Kematian Selama Periode 0-t Mo = Jumlah Migrasi Keluar Selama Periode 0-t Mi = Jumlah Migrasi Masuk Selama Periode 0-t</p>	BKKBN Perwakilan Kaltim	DKP3A Prov. Kaltim
5	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data gender	%	<p>Data gender atau data pilah merupakan informasi utama dan pertama yang diperlukan untuk mempertimbangkan waktu, objek, sasaran secara tepat, sehingga program dan kegiatan dapat dicapai optimal. Dengan data gender Hasil, Partisipasi, Manfaat, dan fungsi kontrol pembangunan dapat diikuti oleh seluruh masyarakat guna mencapai kesetaraan dan keadilan. Penggunaan data gender dalam pembangunan merupakan mandat RPJMNAS, RPJMD yang harus dipedomani dalam pelaksanaan program kegiatan DKP3A dan seluruh Perangkat Daerah.</p> <p>Formulasi Penghitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan data gender}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100$	DKP3A Prov. Kaltim (Data Bidang SIGA)	DKP3A Prov. Kaltim

C. PERJANJIAN KINERJATabel 2.4
Indikator Perjanjian Kinerja (PK) DKP3A Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak terhadap kasus KDRT	Persentase kasus korban kekerasan perempuan dan anak Provinsi Kaltim yang terselesaikan	%	90
2	Meningkatnya implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun anggaran dan perencanaan yang responsif gender	%	100
3	Meningkatnya layanan administrasi kependudukan	Persentase penduduk yang mendapatkan layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	%	100
4	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	%	2.50
5	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data gender	%	50
6	Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparatur sipil negara serta sarana prasarana	Persentase capaian kinerja aparatur sipil negara DKP3A	%	100



1. Rencana Anggaran Tahun 2022

Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 29.037.956.281,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2023 menjadi Rp. 31.566.835.247,- dengan rincian Belanja Operasi Rp. 30.261.773.247,- dan Belanja Modal Rp. 1.305.062.000,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 29.308.767.652,- (92,85%) dengan rincian untuk belanja operasi sebesar Rp. 28.547.926.178,- (97,40%) belanja modal sebesar Rp. 760.841.474,- (2,59%).

2. Target Belanja DKP3A Provinsi Kaltim

Tabel 2.5
Target Belanja DKP3A Tahun 2023

No	Uraian	Tahun Anggaran 2022		
		Anggaran Belanja (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Belanja Operasi	Rp. 30.261.773.247,-	Rp. 28.547.926.178,-	97,40%
2	Belanja modal	Rp. 1.305.062.000,-	Rp. 760.841.474,-	2,59%
	JUMLAH	Rp. 31.566.835.247,-	Rp. 29.308.767.652,-	92,85%

3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja Tahun 2023 Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Anggaran Per Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak terhadap kasus KDRT	Rp. 4.557.400.000,-	Rp. 4.087.991.010,-	89,70
2	Meningkatnya implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan (PPRG)	Rp. 1.700.000.000,-	Rp. 1.689.124.915,-	99,36
3	Meningkatnya layanan administrasi kependudukan	Rp. 2.400.150.000,-	Rp. 2.363.167.945,-	98,46
4	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	Rp. 3.358.200.000,-	Rp. 3.270.279.878,-	97,38
5	Meningkatnya penyajian data gender dan anak di tingkat Provinsi	Rp. 694.400.000,-	Rp. 681.069.384,-	98,08
6	Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparatur sipil negara serta sarana prasarana	Rp. 18.858.685.247,-	Rp. 17.217.134.520,-	91,30

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKIP TAHUN SEBELUMNYA

Pada Sub Bab ini disajikan :

1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Tabel 3.1

Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

No.	Komponan Yang Nilai	Bobot	Nilai 2021	Bobot	Nilai 2022
1	Perencanaan Kinerja	30%	24,34	30%	24,34
2	Pengukuran Kinerja	25%	17,50	20%	17,50
3	Pelaporan Kinerja	15%	11,51	10%	11,51
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	10%	5,62	20%	5,62
5	Capaian Akuntabilitas Kinerja	20%	11,50	20%	11,50
	Nilai Akuntabilitas Kinerja		70,47		72,40
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB (Sangat Baik)		BB (Sangat Baik)

2. Tidak lanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP

Tabel 3.2

Tindak Lanjut hasil evaluasi Inspektorat

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut / Rencana Aksi	Sudah / Belum
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Evaluasi Perencanaan Kinerja	Menerapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah disusun dalam kurun waktu 5 tahun	Sudah
		Melakukan perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dengan menggunakan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan table penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	Sudah
2	Pengukuran Kinerja	Melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit bawahnya secara periodik dan berjenjang oleh setiap level organisasi	Sudah
		Menggunakan informasi dari dokumen pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktur maupun fungsional, pengusulan kebijakan dalam mencapai kinerja	Sudah
		Menggunakan anggaran secara efisien dalam mencapai kinerja	Sudah

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut / Rencana Aksi	Sudah / Belum
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Pelaporan Kinerja	Menyusun dokumen laporan kinerja sesuai standar untuk menggambarkan kualitas dan pencapaian kinerja, informasi keberhasilan dan kegagalan, serta upaya perbaikan	Sudah
		Menggunakan informasi yang ada pada dokumen laporan kinerja untuk menyesuaikan strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Mengimplementasikan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun sebelumnya secara nyata dan menyeluruh	Sudah
5	Capaian Akuntabilitas kinerja	Mengoptimalkan informasi kinerja yang dilengkapi data dukung pada dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) sehingga dapat diandalkan sepenuhnya	Sudah

B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi di lingkungan DKP3A tahun 2023 tertera dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3
 Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulanan	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak terhadap kasus KDRT	Persentase kasus korban kekerasan perempuan dan anak Provinsi Kaltim yang terselesaikan	%	90	Triwulan I		
					Triwulan II		
					Triwulan III		
					Triwulan IV	90	100
2	Meningkatnya implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan (PPRG)	Persentase Perangkat daerah yang menyusun anggaran dan perencanaan yang responsif gender	%	100	Triwulan I		
					Triwulan II		
					Triwulan III		
					Triwulan IV	100	83,78
3	Meningkatnya layanan administrasi kependudukan	Presentase penduduk yang mendapatkan layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	%	100	Triwulan I		
					Triwulan II		
					Triwulan III		
					Triwulan IV	100	99,80
4	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	%	2,50	Triwulan I		
					Triwulan II		
					Triwulan III		
					Triwulan IV	2,50	1,65
5	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data gender	%	50	Triwulan I		
					Triwulan II		
					Triwulan III		
					Triwulan IV	50	65
6	Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparatur sipil negara serta sarana prasarana	Persentase capaian kinerja aparatur sipil negara DKP3A	%	100	Triwulan I		
					Triwulan II		
					Triwulan III		
					Triwulan IV	100	96,20

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sasaran 1 : MENINGKATNYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TERHADAP KASUS KDRT

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

Tabel 3.4
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase kasus korban kekerasan perempuan dan anak Provinsi Kaltim yang terselesaikan	%	90	100	111.11

Data yang tersedia bersumber dari aplikasi kementerian PPPA RI yaitu simfoni PPA yang di input setiap bulan oleh setiap daerah.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

Tabel 3.5

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan / Penurunan Tahun 2023
			2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Persentase kasus korban kekerasan perempuan dan anak Provinsi Kaltim yang terselesaikan	%	93.58	100,00	6,42

Dilihat dari realisasi tahun 2022 kasus korban kekerasan yang terselesaikan mengalami kenaikan yang cukup signifikan, seiring dengan peningkatan pelayanan dan telah dibentuknya UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi :

Tabel 3.6

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (Th. 2023)	Realisasi (Th. 2023)	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase kasus korban kekerasan perempuan dan anak Provinsi Kaltim yang terselesaikan	%	90.00	100,00	111,11

Perbandingan realisasi kinerja indikator persentase kasus korban kekerasan perempuan dan anak Provinsi Kaltim yang terselesaikan dapat disimpulkan terjadi peningkatan penanganan kasus yang cukup signifikan sehingga dapat dikategorikan pelayanan yang diberikan bernilai sangat baik dengan melebihi target.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.7

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase kasus korban kekerasan perempuan dan anak Provinsi Kaltim yang terselesaikan	%	100,00	-	Tidak ada perbandingan kinerja tahun 2022 dengan standar nasional.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan (masing-masing dari tabel 1 s.d 4)

Faktor Keberhasilan :

- Proses pelaporan kasus kekerasan melalui aplikasi SIMFONI PPPA Prov. Kaltim secara online yang dilakukan secara berjenjang dari Provinsi dan Kabupaten/Kota ke Kementerian PPPA RI secara rutin
- Terpenuhinya peraturan perundang-undangan terkait perempuan dan
- Kesadaran masyarakat dalam pelaporan dan pencegahan tindak kekerasan

- Keberhasilan dari sosialisasi di media elektronik secara langsung maupun tidak langsung

Faktor Kegagalan :

- Masih rendahnya upaya pencegahan terhadap pemahaman kekerasan dan diskriminasi perempuan

Alternatif Solusi :

- Melakukan evaluasi program/kegiatan perlindungan perempuan
- Melaksanakan FGD Program kegiatan perlindungan perempuan
- Menindaklanjuti surat Gubernur Kaltim No. 463/147/III/DKP3A/2022 tanggal 3 Agustus 2022 tentang pencegahan dan penanganan korban kekerasan ke Bupati/Walikota se-Kaltim
- Menjalin kerjasama dengan membuat PKS dengan ikatan psikolog klinis wilayah Kaltim dan Dinas PPPA Prov. Kalsel tentang pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta Tindak Pidana Perdagangan Oran (TPPO)

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.8
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)
1	Persentase kasus korban kekerasan perempuan dan anak Provinsi Kaltim yang terselesaikan	100,00	89,70	10,3

Capaian kinerja secara umum mengalami peningkatan yang baik, hanya saja untuk penyerapan anggaran belum terserap dengan baik dikarenakan adanya lembaga perlindungan perempuan dan anak yang seharusnya dibentuk di tahun 2022 dengan belanja yang telah telah disediakan, tetapi dalam pelaksanaannya terkait dengan peralihan dari kebijakan pusat ke kebijakan daerah sehingga belum bisa terealisasi dengan baik.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian sasaran Persentase kasus korban kekerasan perempuan dan anak Provinsi Kaltim yang terselesaikan didukung oleh Program/Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.9
Program/Kegiatan penunjang pencapaian sasaran

Program/Kegiatan	Satuan	Target	Capaian	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kebijakan	2	1	50,00
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	1	100,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	dokumen	2	2	100,00
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	layanan	10	10	100,00
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	1	100,00
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	orang	80	99	123,75
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	layanan	80	150	187,50
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	orang	15	15	100,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Orang	15	15	100,00

Sasaran 2 : MENINGKATNYA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN (PPRG)

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

Tabel 3.10

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase Perangkat daerah yang menyusun anggaran dan perencanaan yang responsif gender	%	100,00	83,78	83,78%

Data diambil dengan menghimpun Anggaran Responsif Gender (ARG) di semua

Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

Tabel 3.11

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan / Penurunan Tahun 2023
			2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Persentase Perangkat daerah yang menyusun anggaran dan perencanaan yang responsif gender	%	86,49	83,78	-2,71

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Indikator pada tahun 2022 mencapai 86,49 dan tahun 2023 sebesar 83,78 mengalami penurunan sebesar -2,71. Tahun 2023 dari 37 perangkat daerah sebanyak 31 perangkat daerah yang telah menyusun GAP dan GBS. Hal ini di dukung dengan dibentuknya Klinik Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Kaltim (Klik Peran Si Gen) sehingga setiap perangkat daerah dapat berkonsultasi terkait penyusunan ARG. Dibanding dengan tahun sebelumnya 2022 mengalami penurunan 2,71 % dikarenakan kurangnya komitmen perangkat daerah dalam penyusunan ARG. Tahun 2023 DKP3A telah melakukan penilaian dan verifikasi PUG yang dilakukan oleh tim driver pada Perangkat Daerah.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi :

Tabel 3.12

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (Th. 2023)	Realisasi (Th. 2023)	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase Perangkat daerah yang menyusun anggaran dan perencanaan yang responsif gender	%	100	83,78	83,78

Tahun 2023 sebanyak 31 perangkat daerah telah menyusun Anggaran Responsif Gender dari 37 perangkat daerah di Provinsi Kalimantan Timur.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.13

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase Perangkat daerah yang menyusun anggaran dan perencanaan yang responsif gender	%	83,78	-	Tidak ada perbandingan kinerja tahun 2022 dengan standar nasional.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan (masing-masing dari tabel 1 s.d 4)

Faktor Keberhasilan :

- Terlah terbentuknya regulasi terkait PUG (Perda Kaltim no. 2 tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender)
- Adanya komitmen kepala daerah dengan menjadikan GAP dan GBS sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan asistensi dokumen perencanaan anggaran
- Adanya evaluasi dan pamantauan implementasi PUG dari KPPA dengan memberikan penghargaan berupa Anugerah Parahita Ekapraya (APE)
- Provinsi dan Kabupaten/Kota telah berupaya untuk memenuhi prasyarat PUG dengan membentuk kelembagaan : Pokja PUG, Tim Penggerak PUG, Tim Teknis dan Focal Point.

Faktor Kegagalan :

- Masih rendahnya upaya pencegahan terhadap pemahaman kekerasan dan diskriminasi perempuan
- Belum optimalnya implementasi PUG pada setiap urusan pembangunan baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota
- Belum terinternalisasinya proses data pilah dalam setiap sektor sehingga penentuan kebijakan tidak melakukan analisa kesenjangan
- Budaya patriarkhi yang melembaga dalam kehidupan masyarakat sehingga munculnya ketidaksetaraan perempuan dan laki-laki dalam peran pembangunan

Alternatif Solusi :

- Melakukan advokasi koordinasi terkait implementasi PUG
- Melakukan penguatan kelembagaan PUG
- Menyelaraskan keserasian kebijakan PUG di daerah
- Dalam melaksanakan implementasi PUG, 7 prasyarat PUG dalam alur kerja pengarusutamaan gender sekaligus menjadi kerangka input yang harus dibangun dalam implementasi PUG sehingga muncul output yang berkontribusi dalam meningkatkan KKG

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.14

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)
1	Persentase Perangkat daerah yang menyusun anggaran dan perencanaan yang responsif gender	83,78	99,56	15,78

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian sasaran Persentase Perangkat daerah yang menyusun anggaran dan perencanaan yang responsif gender didukung oleh Program/Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.15

Program/Kegiatan penunjang pencapaian sasaran

Program/Kegiatan	Satuan	Target	Capaian	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kebijakan	1	1	100,00
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Kebijakan	1	1	100,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	dokumen	1	1	100,00
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Perangkat Daerah	35	31	88,57
Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Perangkat Daerah	35	31	88,57

Program/Kegiatan	Satuan	Target	Capaian	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi	dokumen	1	1	100,00
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	dokumen	1	1	100,00
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	organisasi	10	10	100,00
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	dokumen	1	1	100,00
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	lembaga	10	10	100,00
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	orang	100	100	100,00
Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	dokumen	1	1	100,00

Sasaran 3 : MENINGKATNYA LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

Tabel 3.16

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Presentase penduduk yang mendapatkan layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	%	100	99,80	99,80

Data bersumber dari Data Kependudukan Bersih (DKB) Kemendagri Semester I Tahun 2023 yang terdiri dari :

1. Data Perekaman KTP EI DKB Kabupaten/Kota Se-Kaltim Tahun 2023

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK	WKTP AWAL	PEREKAMAN AWAL	BELUM PEREKAMAN AWAL	PERSENTASE AWAL	PROGRES PERSENTASE
1	PASER	303.424	214.096	209.029	5.067	97,63	97,95
2	KUTAI KARTANEGARA	788.113	556.526	543.810	12.716	97,72	98,21
3	BERAU	280.998	195.596	195.596	0	100,00	99,99
4	KUTAI BARAT	180.119	130.439	128.398	2.041	98,44	98,65
5	KUTAI TIMUR	429.640	299.709	289.699	10.010	96,66	97,49
6	PENAJAM PASER UTARA	196.566	139.415	136.680	2.735	98,04	98,43
7	MAHAKAM ULU	38.498	28.191	27.680	511	98,19	98,42
8	KOTA BALIKPAPAN	738.532	530.837	530.790	47	99,99	99,99
9	KOTA SAMARINDA	861.878	623.593	612.291	11.302	98,19	98,50
10	KOTA BONTANG	189.968	135.642	131.206	4.436	96,73	97,20
	TOTAL	4.007.736	2.854.044	2.805.179	48865	98,29	98,61

2. Data Laporan Kinerja Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun 2022

No	Kode	Wilayah	Usia 0-18 Tahun						Memiliki Akta Kelahiran					
			Laki-Laki		Perempuan		Jumlah		Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
			Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%
1	6401	KAB. PASER	50.435	51.44%	47.602	48.56%	98.037	7.75%	49.128	97.41%	46.385	97.44%	95.513	97.43%
2	6402	KAB. KUTAI KARTANEGARA	131.440	51.60%	123.275	48.40%	254.715	20.14%	129.669	98.65%	121.661	98.69%	251.330	98.67%
3	6403	KAB. BERAU	46.012	51.64%	43.084	48.36%	89.096	7.05%	45.844	99.63%	42.952	99.69%	88.796	99.66%
4	6407	KAB. KUTAI BARAT	28.523	52.16%	26.165	47.84%	54.688	4.32%	28.371	99.47%	26.062	99.61%	54.433	99.53%
5	6408	KAB. KUTAI TIMUR	75.505	52.10%	69.409	47.90%	144.914	11.46%	73.164	96.90%	67.364	97.05%	140.528	96.97%
6	6409	KAB. PENAJAM PASER UTARA	32.618	51.85%	30.287	48.15%	62.905	4.97%	32.132	98.51%	29.885	98.67%	62.017	98.59%
7	6411	KAB. MAHAKAM ULU	5.995	51.24%	5.704	48.76%	11.699	0.93%	5.930	98.92%	5.642	98.91%	11.572	98.91%
8	6471	KOTA BALIKPAPAN	116.741	51.73%	108.935	48.27%	225.676	17.85%	116.298	99.62%	108.586	99.68%	224.884	99.65%
9	6472	KOTA SAMARINDA	134.931	51.55%	126.793	48.45%	261.724	20.70%	128.136	94.96%	120.357	94.92%	248.493	94.94%
10	6474	KOTA BONTANG	31.708	51.94%	29.334	48.06%	61.042	4.83%	31.272	98.62%	28.996	98.85%	60.268	98.73%
		JUMLAH	653.908	51.71%	610.588	48.29%	1.264.496	100.00%	31.272	98.62%	28.996	98.85%	60.268	98.73%

Dari Kedua data diatas diformulasikan menjadi :

(Data ata Perekaman KTP EI + Data Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18)

Jumlah data layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil

3. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

Tabel 3.17

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan / Penurunan Tahun 2023
			2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Presentase penduduk yang mendapatkan layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	%	100,90	99,80	-1,10

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi :

Tabel 3.18

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (Th. 2023)	Realisasi (Th. 2023)	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Presentase penduduk yang mendapatkan layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	%	100	99,80	99,80

Tertibnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota menggambarkan capaian data kependudukan setiap tahun yang dihasilkan secara berkualitas dan valid.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.19

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Presentase penduduk yang mendapatkan layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	%	99,80	98.15	1,65

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan (masing-masing dari tabel 1 s.d 4)

Faktor Keberhasilan :

- Kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dll
- SOP untuk mendapatkan administrasi kependudukan mudah dipahami oleh masyarakat
- Kelengkapan kebutuhan data yang dirilis Data Kependudukan Bersih (DKB) persemester melalui Ditjen Dukcapil yang menjadi satu-satunya data yang digunakan untuk semua kepentingan

Faktor Kegagalan :

- Keterbatasan penyediaan blanko E-KTP
- Data Kependudukan Bersih (DKB) tidak tepat waktu sehingga aplikasi E-Infoduk, buku data penduduk persemester dan profil perkembangan kependudukan menjadi terlambat dalam penyajian
- Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan akta pencatatan sipil sehingga cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil belum maksimal dan akurasi data kependudukan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi real di Daerah

Alternatif Solusi :

- Melakukan pelatihan dan bimtek bagi ADB agar memberikan pelayanan lebih cepat
- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya adminduk

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.20

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)
1	Presentase penduduk yang mendapatkan layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	99,80	98,46	1,34

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian sasaran Persentase Perangkat daerah yang menyusun anggaran dan perencanaan yang responsif gender didukung oleh Program/Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.21

Program/Kegiatan penunjang pencapaian sasaran

Program/Kegiatan	Satuan	Target	Capaian	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kebijakan	6	2	33,33
Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Kebijakan	1	1	100,00
Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	dokumen	6	6	100,00
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kebijakan	6	2	33,33
Pelayanan Pencatatan Sipil	Dokumen	1	1	100,00
Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	dokumen	6	3	50,00
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kebijakan	5	2	40,00
Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	dokumen	3	3	100,00
Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	dokumen	6	6	100,00

Sasaran 4 : TERKENDALINYA LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK

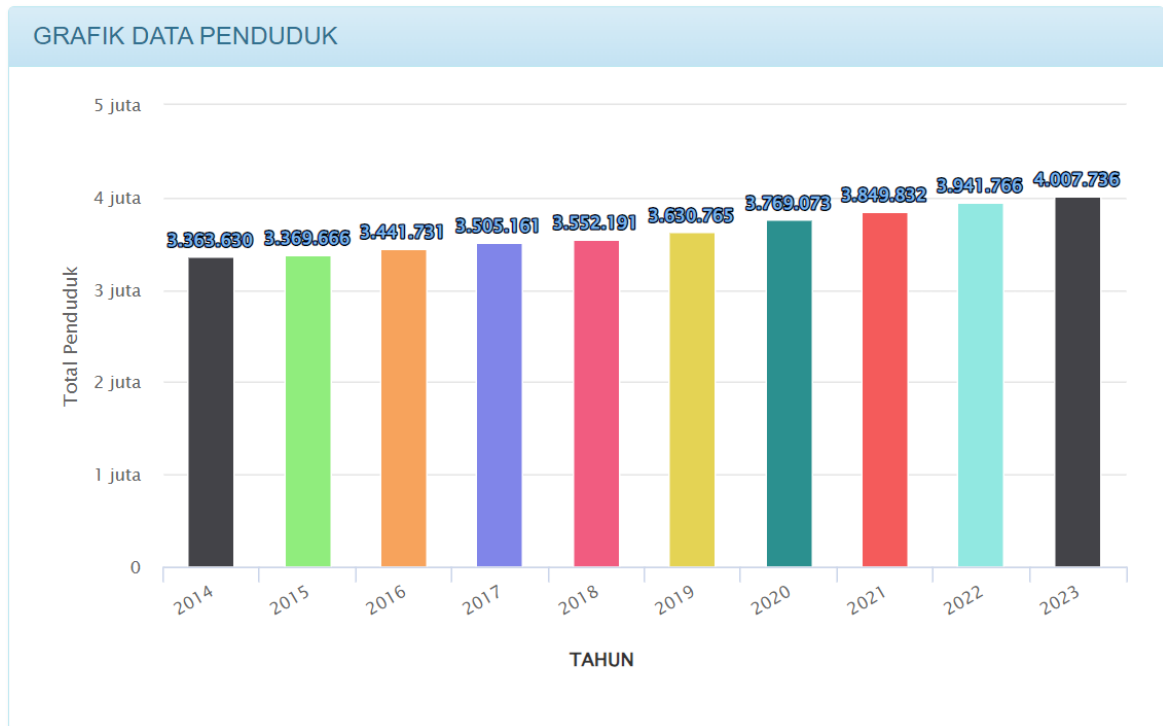
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

Tabel 3.22

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Laju pertumbuhan penduduk	%	2.50	1,65	66,00

Data diambil dari sumber data kependudukan bersih (DKB) Kemendagri RI tahun 2023 dengan rincian data sebagai berikut :



2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

Tabel 3.23

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan / Penurunan Tahun 2023
			2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Laju pertumbuhan penduduk	%	2.33	1,65	-0,68

Peningkatan pertumbuhan penduduk Kaltim dipengaruhi karena adanya tingkat kelahiran dan perpindahan penduduk semakin tinggi dari tahun sebelumnya. Rasio Perbandingan Jenis Kelamin Laki-Laki = 52 % Perempuan 48 % dengan Laju Pertumbuhan Penduduk Kaltim = 2,33 %. Pertumbuhan Penduduk Tertinggi di Kab. Mahakam Ulu sebesar 5,48 % sedangkan Pertumbuhan Penduduk Terkecil di Kab. Kutai Timur sebesar 0,25 %. Secara Jumlah Penambahan Penduduk tertinggi di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 24.234 Jiwa, sedangkan Secara Jumlah Penambahan Penduduk terendah di Kota Bontang sebanyak 744 Jiwa.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi :

Tabel 3.24

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (Th. 2023)	Realisasi (Th. 2023)	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Laju pertumbuhan penduduk	%	2.50	1,65	66,00

Secara kuantitas penduduk Kaltim mengalami peningkatan yang cukup stabil dengan pertumbuhan yang cenderung melambat. Peningkatan ini dipicu tingkat kelahiran yang cukup tinggi seiring dengan meningkatnya migran yang masuk ke wilayah Kaltim. Selain itu salah satu indikator perkembangan wilayah adalah kemudahan, yakni kemudahan masyarakat dalam memperoleh kebutuhan, sehingga wilayah perkotaan dengan sarana dan prasarana yang lebih lengkap akan lebih cepat berkembang. Sedangkan Wilayah

kabupaten di Kaltim masih memiliki kepadatan yang relatif rendah. Kabupaten terjarang terletak di Kabupaten Mahakam Ulu dengan kepadatan penduduk hanya sebanyak 2 jiwa per km².

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.25

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Laju pertumbuhan penduduk	%	1,65	-	Tidak ada perbandingan kinerja tahun 2023 dengan standar nasional.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan (masing-masing dari tabel 1 s.d 4)

Faktor Keberhasilan :

- Tingginya partisipasi pasangan usia subur dalam mengikuti program KB
- Kemudahan pada akses pelayanan KB
- Terbitnya Pergub no. 2 tahun 2022 tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagai dasar mewujudkan pemahaman SDM ketahanan keluarga

Faktor Kegagalan :

- Adanya pengaruh dari imigrasi penduduk yang cukup tinggi dibandingkan angka kelahiran
- Masih rendahnya pemahaman tentang pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Alternatif Solusi :

- Melakukan edukasi kepada organisasi masyarakat , pemerhati peempuan tentang KB
- Koordinasi dengan Dinas pengampu urusan pengendalian penduduk dan KB dalam upaya peningkatan program KB di Kabupaten/Kota
- Optimalisasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas untuk memberdayakan dan memperkuat institusi keluarga melalui penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas di setiap desa/kelurahan

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.26

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)
1	Laju pertumbuhan penduduk	66,00	97,38	31,38

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian sasaran Persentase Perangkat daerah yang menyusun anggaran dan perencanaan responsif gender didukung oleh Program/Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.27

Program/Kegiatan penunjang pencapaian sasaran

Program/Kegiatan	Satuan	Target	Capaian	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Kebijakan	1	1	100,00
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Dokumen	5	5	100,00
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	laporan	3	3	100,00
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	%	50	50	100,00
Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	dokumen	1	1	100,00
Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK	dokumen	1	1	100,00
Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	dokumen	1	1	100,00
Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	laporan	1	1	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Kebijakan	1	1	100,00



Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	dokumen	1	1	47,06
Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	laporan	1	1	100,00

Sasaran 5 : MENINGKATNYA PEMANFAATAN DATA GENDER DAN ANAK

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

Tabel 3.28

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender	%	50	65	130.00

Data didapat dari pengumpulan data pilah dari semua perangkat daerah Provinsi Kalimantan Timur per tahun.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

Tabel 3.29

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan / Penurunan Tahun 2022
			2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender	%	65	65	-

Dari 20 perangkat daerah terkait data anak, yang telah memberikan data terpilah sebanyak 16 perangkat daerah dengan jumlah jenis data sebanyak 41 elemen/variabel, dan capaian data terpilah anak adalah 80 %. Dan 26 perangkat daerah terkait data gender yang memberikan data terpilahnya ada sebanyak 22 perangkat daerah dengan 75 variabel yang sudah terpilah gender. Sehingga data terpilah gender mencapai 84 %.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi :

Tabel 3.30

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (Th. 2023)	Realisasi (Th. 2022)	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender	%	50	65	130.00

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.31

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender	%	65	-	Tidak ada perbandingan kinerja tahun 2022 dengan standar nasional.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan (masing-masing dari tabel 1 s.d 4)

Faktor Keberhasilan :

- Capaian data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan berdasarkan data pilah
- Adanya kebijakan dan data regulasi yang memanfaatkan penggunaan data pilah sebagai dasar proses penyusunan program kegiatan
- Tingginya komitmen perangkat daerah dalam penyelenggaraan program one map one data sehingga data gender bagian dari hal tersebut

Faktor Kegagalan :

- Kurangnya kesadaran dan disiplin perangkat daerah dalam memberikan data secara terpilah
- Belum optimalnya pengelolaan data pilah di setiap stakeholder

Alternatif Solusi :

- Selalu memberikan pendampingan dan bimbingan kepada perangkat daerah dalam membuat laporan data terpilah
- Sosialisasi dan bimtek terkait penyusunan data pilah/data gender

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.32

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)
1	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender	100.00	98.36	1.64

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian sasaran Persentase Perangkat daerah yang menyusun anggaran dan perencanaan yang responsif gender didukung oleh Program/Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.33

Program/Kegiatan penunjang pencapaian sasaran

Program/Kegiatan	Satuan	Target	Capaian	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	%	75	70	100,00
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	%	75	70	100,00
Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	dokumen	3	25	100,00
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	dokumen	1	25	100,00

**Sasaran 6 : MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS APARATUR SIPIL
NEGARA SERTA SARANA PRASARANA**

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

Tabel 3.34

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase capaian kinerja aparatur sipil negara DKP3A	%	100	96.20	96.20

Persentase capaian kinerja aparatur sipil negara DKP3A diukur dari aspek kualitas yang dilakukan dengan membandingkan antara Realisasi Kualitas dengan Target Kualitas melalui Penghitungan capaian Sasaran Kinerja.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

Tabel 3.35

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan / Penurunan Tahun 2022
			2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Persentase capaian kinerja aparatur sipil negara DKP3A	%	96.84	96.20	0.64

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi :

Tabel 3.36

Perbandingan ealisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (Th. 2023)	Realisasi (Th. 2023)	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase capaian kinerja aparatur sipil negara DKP3A	%	100	96.20	96.20

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.37

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase capaian kinerja aparatur sipil negara DKP3A	%	96.20	-	Tidak ada perbandingan kinerja tahun 2022 dengan standar nasional.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan (masing-masing dari tabel 1 s.d 4)

Faktor Keberhasilan :

- Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang kependudukan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Faktor Kegagalan :

- Kurangnya SDM dalam pelayanan
- Sarana dan prasarana yang belum maksimal dalam menunjang pelaksanaan tugas

Alternatif Solusi :

- Kesesuaian persyaratan dengan jenis pelayanannya, kemudahan prosedur pelayanan, kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan
- Kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.38

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)
1	Persentase capaian kinerja aparatur sipil negara DKP3A	96.20	92.85	3,35

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian sasaran Persentase Perangkat daerah yang menyusun anggaran dan perencanaan yang responsif gender didukung oleh Program/Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.39

Program/Kegiatan penunjang pencapaian sasaran

Program/Kegiatan	Satuan	Target	Capaian	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	%	95	90	94,74
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	105,97
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	2	100,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen	2	2	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	19	19	100,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	4	4	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	92	100,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	44	41	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	1	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	4	4	100,00



Program/Kegiatan	Satuan	Target	Capaian	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	100,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya	Paket	3	3	100,00
Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan	Orang	34	75	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	paket	4	4	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	6	6	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	2	2	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan	dokumen	84	84	100,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	laporan	1	1	100,00
Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	%	20	20	109,76
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	25	25	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PemerintahanDaerah	%	100	100	100,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1	1	75,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	laporan	1	1	100,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan PerlengkapanKantor	laporan	1	1	100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan	1	1	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan KendaraanDinas Operasional atau Lapangan	paket	15	15	100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau BangunanLainnya	tahun	1	1	100,00

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Pencapaian SDG's Tahun 2023

Tabel 3.40
Pencapaian SDG's Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Target Capaian Kinerja	Capaian Penyerapan Anggaran	Status Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat	20.5	15.5	Perlu perhatian khusus
2	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial/kepemimpinan di Pemerintah	31	34.18	Tercapai

keterwakilan perempuan yang menduduki jabatan di legislatif Kalimantan Timur selama kurun waktu 3 periode yaitu dari 2009-2014, 2014-2019 dan 2019- 2024 sangat fluktuatif dan rata-rata mencapai 15,5 persen di DPRD Kaltim. Sedangkan keterwakilan perempuan yang menduduki jabatan dilegislatif pada DPRD Kabupaten dan Kota selama kurun waktu 3 periode tersebut juga mengalami fluktuatif rata-rata hanya mencapai 16,42 persen dari total anggota sebanyak 332 orang. Apabila memperhatikan data kependudukan Provinsi Kalimantan Timur, dimana jumlah laki-laki sebanyak 1.961.634 jiwa atau 52,09 persen. Sementara perempuan sebanyak 1.804.405 jiwa atau 47,90 persen. Dari data tersebut keterwakilan politik laki-laki dan perempuan dalam posisi yang seimbang. Oleh karena itu, calon legislatif perlu pengetahuan yang cukup diantaranya terkait regulasi dan berbagai tematik. Tidak kalah penting adalah memahami penggarusutamaan gender sebagai sebuah strategi pembangunan yang bertujuan mengurangi kesenjangan Kaltim.

Pemerintah Provinsi melalui DKP3A Kaltim terus berkomitmen untuk meningkatkan peranan perempuan dalam politik dan pembangunan diantaranya dengan meningkatkan kapasitas pengurus partai politik perempuan dalam bentuk sosialisasi maupun pembekalan sebagai upaya penguatan perempuan dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagai anggota legislatif

E. REALISASI ANGGARAN

1. Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

Tabel 3.41

Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Alokasi	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak terhadap kasus KDRT	90	100	111,12	4.557.400.000	4.087.991.010	89,70
2	Meningkatnya implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan (PPRG)	100	83,78	83,78	1.700.000.000	1.689.124.915	99,36
3	Meningkatnya layanan administrasi kependudukan	100	99,80	99,80	2.400.150.000	2.363.167.945	98,46
4	terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	2,50	1,65	66,00	3.358.200.000	3.270.279.878	97,38
5	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	50	65	130,00	694.400.000	681.069.384	98,30
6	Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparatur sipil negara serta sarana prasarana	100	96,20	96,20	18.858.685.247	17.217.134.520	91,30
Total					31.566.835.247	29.308.767.652	92,85

Analisis :

Pada realisasi anggaran berdasarkan perjanjian kinerja diatas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja meningkat dengan rata-rata capaian diatas 100 persen, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya memadai serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil.

Adapun pada sasaran 1 Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak terhadap kasus KDRT yang nilai kinerjanya diatas 100 persen tetapi capaian anggarannya sebesar 79,65 disebabkan karena tingginya angka kasus kekerasan yang terjadi sehingga tingkat pelayanan kasus yang tertangani mengalami kenaikan. Sedangkan realisasi anggaran

belum mencapai penyerapan yang maksimal karena baru terbentuknya UPTD PPA sehingga anggaran UPTD PPA belum teralokasi dari awal tahun dan baru teralokasi pada APBD-P Tahun 2022.

2. Realisasi anggaran per program dan Kegiatan

Tabel 3.42

Realisasi anggaran per program kegiatan

Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kependudukan, Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak	%	100	95	18.858.685.247	17.217.134.520	91,30
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>persentase dokumen perencanaan dan penganggaran DKP3A yang tepat waktu dan tepat proses</i>	%	100	100	633.120.000	630.713.866	99,62
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	248.720.000	248.186.199	99,79
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	Dokumen	2	2	129.000.000	128.834.850	99,87
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	2	5.500.000	5.500.000	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	19	19	115.800.000	114.196.417	98,62
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	134.100.000	133.996.400	99,92
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase realisasi anggaran DKP3A Provinsi Kaltim</i>	%	100	92	10.725.665.007	9.805.561.494	91,42
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	44	41	10.651.665.007	9.731.739.494	91,36
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	51.000.000	51.000.000	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4	4	23.000.000	22.822.000	99,23
<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase kedisiplinan pegawai</i>	%	100	100	707.306.500	690.630.169	97,64
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	paket	3	3	198.897.300	198.075.000	99,59



Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	34	75	508.409.200	492.555.169	96,88
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	100	100	2.218.694.400	2.200.622.000	99,19
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	10.362.000	10.362.000	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	6	6	164.685.000	164.647.525	99,98
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2	2	96.226.500	96.226.500	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	84	84	13.574.400	11.760.000	86,63
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	1	1	234.306.500	234.300.500	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	1	1	1.699.540.000	1.683.325.475	99,05
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Tersedianya peralatan dan mesin lainnya</i>	%	20	20	535.027.000	504.381.974	94,27
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	25	25	535.027.000	504.381.974	94,27
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah</i>	%	100	100	2.876.965.840	2.760.579.800	95,95
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1	1	10.855.200	10.378.000	95,60
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	458.844.000	374.073.940	81,53
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	35.950.000	35.865.100	99,76
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	1	1	2.371.316.640	2.340.262.760	98,69
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase barang milik daerah yang digunakan dan berfungsi baik</i>	%	100	100	1.161.906.500	624.645.217	53,76
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Paket	15	15	270.951.500	244.083.217	90,08
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tahun	1	1	890.955.000	380.562.000	42,71
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN	Implementasi Kelembagaan PUG	Kebijakan	1	1	1.700.000.000	1.689.124.915	99,36



Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	%
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN							
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Penguatan kelembagaan PUG	kebijakan	1	1	950.000.000	945.824.878	99,56
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	dokumen	1	1	550.000.000	549.888.497	99,98
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi	Perangkat Daerah	35	31	300.000.000	296.274.210	98,76
Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Perangkat Daerah	35	31	100.000.000	99.662.171	99,66
<i>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi</i>	<i>Pengembangan SDM Perempuan Bidang Politik dan hukum</i>	<i>dokumen</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>350.000.000</i>	<i>345.659.459</i>	<i>98,76</i>
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	1	200.000.000	198.088.466	99,04
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang mengikuti/mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabupaten/Kota	Organisasi	10	10	150.000.000	147.570.993	98,38
<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi</i>	<i>Penguatan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan</i>	<i>dokumen</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>400.000.000</i>	<i>397.640.578</i>	<i>99,41</i>
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	lembaga	10	10	137.440.000	136.961.624	99,65
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	100	100	135.630.000	134.017.896	98,81



Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	%
Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Tersedia	dokumen	1	1	126.930.000	126.661.058	99,79
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kebijakan Perlindungan Perempuan	Kebijakan	2	1	2.870.400.000	2.499.029.918	87,06
<i>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Peningkatan SDM yang memahami pencegahan kekerasan terhadap perempuan</i>	<i>dokumen</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1.641.300.000</i>	<i>1.345.623.137</i>	<i>81,99</i>
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Dokumen	2	2	852.100.000	668.348.298	78,44
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan tingkat daerah Provinsi dan lintas Daerah Kab/Kota	layanan	10	10	789.200.000	677.274.839	85,82
<i>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>jumlah dokumen layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan</i>	<i>dokumen</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1.154.504.000</i>	<i>1.082.286.781</i>	<i>93,74</i>
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	Orang	80	99	500.000.000	482.798.657	96,56
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Layanan	80	150	654.504.000	599.488.124	91,59
<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi</i>	<i>peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pada unit penyedia layanan</i>	<i>orang</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>74.596.000</i>	<i>71.120.000</i>	<i>95,34</i>
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	15	15	74.596.000	71.120.000	95,34
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Capaian Data Gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan berdasarkan Data Pilah	%	75	75	692.400.000	681.069.384	98,36



Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	%
<i>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi</i>	<i>Capaian Data Gender dan Anak sebagai dasar perencanaan pembangunan berdasarkan data pilah</i>	%	75	75	692.400.000	681.069.384	98,36
Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	Dokumen	3	3	448.400.000	440.596.622	98,26
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Dokumen	1	1	244.000.000	240.472.762	98,55
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Penguatan Pemenuhan Hak Anak	Kebijakan	3	3	471.000.000	453.206.414	96,22
<i>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi</i>	<i>Penguatan pelembagaan PHA</i>	<i>Kab/Kota</i>	1	1	274.600.000	268.343.509	97,72
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga	Jumlah Organisasi Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha	Organisasi Pemerintah an	30	35	156.600.000	151.734.484	96,89
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	dokumen	1	1	118.000.000	116.609.025	98,82
<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi</i>	<i>Jumlah dokumen penguatan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak</i>	<i>dokumen</i>	1	1	196.400.000	184.862.905	94,13
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	dokumen	1	1	98.000.000	86.767.888	88,54
Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	1	98.400.000	98.095.017	99,69
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Hak Anak	%	90	90	1.216.000.000	1.135.754.678	93,40
<i>Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>dokumen pencegahan kekerasan terhadap anak</i>	<i>dokumen</i>	1	1	336.000.000	293.424.274	87,33
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	dokumen	1	1	336.000.000	293.424.274	87,33



Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	%
<i>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi</i>	<i>jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (KIE) anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi</i>	<i>dokumen</i>	1	1	880.000.000	842.330.404	95,72
Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	dokumen	1	1	880.000.000	842.330.404	95,72
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kebijakan terkait dengan pendaftaran penduduk	Kebijakan	6	3	1.624.150.000	1.595.591.384	98,24
<i>Pelayanan Pendaftaran Kependudukan</i>	<i>jumlah kebijakan terkait pelayanan pendaftaran penduduk Kab/Kota Se-Kaltim</i>	<i>kebijakan</i>	1	1	1.624.150.000	1.595.591.384	98,24
Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan	dokumen	6	6	1.624.150.000	1.595.591.384	98,24
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kebijakan terkait pencatatan sipil	Kebijakan	6	2	278.000.000	275.502.763	99,10
<i>Pelayanan Pencatatan Sipil</i>	<i>Jumlah kebijakan teknis di bidang pencatatan sipil yang ditetapkan</i>	<i>Dokumen</i>	1	1	278.000.000	275.502.763	99,10
Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil yang Ditetapkan	dokumen	6	3	278.000.000	275.502.763	99,10
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kebijakan terkait pengelolaan administrasi kependudukan	Kebijakan	5	2	498.000.000	492.073.798	98,81
Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah data kependudukan	dokumen	3	3	498.000.000	492.073.798	98,81
Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	dokumen	6	6	498.000.000	492.073.798	98,81
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Kebijakan tentang pengendalian penduduk	Kebijakan	1	1	1.377.400.000	1.357.195.654	98,53
<i>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</i>	<i>kebijakan tentang pengendalian penduduk</i>	<i>dokumen</i>	5	5	1.377.400.000	1.357.195.654	98,53
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Laporan Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	laporan	3	3	1.377.400.000	1.357.195.654	98,53



Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	%
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Peningkatan SDM yang mendapatkan KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	%	50	80	1.027.500.000	975.673.425	94,96
<i>Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal</i>	<i>Peningkatan jumlah peserta KB</i>	<i>dokumen</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1.027.500.000</i>	<i>975.673.425</i>	<i>94,96</i>
Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Dokumen	1	1	880.000.000	850.650.992	96,66
Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak- Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Dokumen	1	1	70.000.000	51.610.985	73,73
Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	laporan	1	1	77.500.000	73.411.448	94,72
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Peningkatan SDM Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kebijakan	1	1	953.300.000	937.410.799	98,33
<i>Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>	<i>Peningkatan organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga</i>	<i>dokumen</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>953.300.000</i>	<i>937.410.799</i>	<i>98,33</i>
Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	1	1	953.300.000	937.410.799	98,33
TOTAL					31.566.835.247	29.308.767.652	92,85

Analisa :

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 31.566.835.247,- dengan realisasi sebesar Rp. 29.308.767.652,-.

Pencapaian realisasi anggaran tahun 2023 terbilang sangat baik dengan realisasi sebesar 92,85%. Adapun kegiatan yang masih rendah capaian anggarannya yaitu dibawah 50% adalah kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yaitu sebesar 42,71% % hal ini disebabkan pada penundaan pengadaan rehab gedung kantor.

BAB IV

PENUTUP

Pada Renstra Tahun 2018-2023, Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan 6 (enam) tujuan dan 6 (enam) sasaran yang akan dicapai. Keenam sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 6 (enam) indikator kinerja. Realisasi pada akhir tahun menunjukkan bahwa 6 (enam) sasaran dapat dicapai dengan hasil baik.

Berdasarkan uraian capaian kinerja dari Indikator Kinerja Sasaran Renstra Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018-2023, dapat diuraikan sebagai berikut :

- SASARAN 1 Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak terhadap kasus KDRT, yaitu jumlah kasus yang dilayani dibanding dengan jumlah kasus yang masuk dengan capaian 105.15 %
- SASARAN 2 Meningkatnya implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan (PPRG), yaitu Persentase Perangkat Daerah yang melakukan analisa gender berupa GAB dan GBS pada Program yang termuat dalam DPA dengan capaian 101.74 %
- SASARAN 3 Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk Kaltim, berada pada 3,67 % di angka nasional sehingga laju pertumbuhan penduduk Kaltim dengan capaian kinerja 2,33 %
- SASARAN 4 Meningkatnya layanan administrasi kependudukan, Provinsi Kaltim untuk perekaman/cetak E-KTP dan kepemilikan akta kelahiran tahun 2021 dengancapaian kinerja 100.90 %
- SASARAN 5 Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak dengan indikator Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data gender dengan capaian kinerja 144.44 %
- SASARAN 6 Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparatur sipil negara serta sarana prasarana dengan capaian kinerja 96.84 %

Untuk meningkatkan capaian kinerja organisasi di masa mendatang, Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur akan melakukan langkah-langkah optimalisasi, melalui :

1. Meningkatkan pelembagaan PUG di lembaga pemerintah tingkat provinsi dan mendorong Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pelembagaan PUG di Kabupaten/Kota masing-masing melalui upaya pelatihan, pendampingan dan evaluasi pelaksanaan;
2. Peningkatan produktivitas ekonomi perempuan, peningkatan pemahaman pendidikan politik bagi perempuan dan advokasi kader organisasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan;
3. Penurunan jumlah korban melalui upaya pencegahan (media KIE, kampanye, advokasi, kerjasama dunia usaha dan lembaga masyarakat) dan pengurangan risiko pada perempuan dan anak kelompok rentan (rawan terjadi tindak kekerasan);
4. Peningkatan kualitas layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui peningkatan SDM petugas layanan, tata laksana, sarana prasarana, kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah, pemanfaatan teknologi dan informasi serta mengembangkan jejaring penanganan korban;

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023.

Samarinda, 1 Februari 2024

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Kalimantan Timur,



Hilman Soravalita, SE, MMT
Pembina Utama Muda
NIP. 19651215 198601 2 002

LAMPIRAN

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Kasus KDRT	Persentase kasus korban kekerasan perempuan dan anak provinsi Kaltim yang terselesaikan	%	90,00	100,00
2	Meningkatnya implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan (PPRG)	Persentase perangkat daerah yang menyusun anggaran dan perencanaan yang responsif gender	%	100,00	83,78
3	Meningkatnya Layanan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk yang mendapatkan layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	%	100,00	99,80
4	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	2,50	1,65
5	Meningkatnya Pemanfaatan data gender dan anak	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender	%	50	65,00
6	Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparatur sipil negara serta sarana prasarana	Persentase capaian kinerja aparatur sipil negara DKP3A	%	100	96,20

Samarinda, 1 Februari 2024

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Kalimantan Timur,



H. Nurani Sirevalita, SE, MMT

Rombia Utama Muda

NIP. 19651215 198601 2 002

TABEL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) PERIODE RPJMD 2019-2023

No.	Fokus/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Setiap Tahun					Capaian Kinerja Setiap Tahun					Sumber Data
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Indeks Pemberdayaan Gender (%)	56,70	56,71	65,63	65,54	65,7	65,65	65,54	66,64	66,89	66,89	BPS
2	Persentase Pelaku Ekonomi Perempuan (%)	48,00	62,00	50,00	60,00	70,00	37,00	62,00	47,98	64,00	96,00	DKP3A
3	Persentase Pemenuhan Hak Anak (%)	76,00	82,00	88,00	90,00	90,00	70,00	82,00	90,00	90,00	90,00	DKP3A
4	Ratio KDRT (%)	0,06	0,05	0,048	0,042	0,038	0,023	0,024	0,029	0,018	0,023	DKP3A
5	Jumlah Kampung KB	160	175	299	315	330	160	175	299	236	458	BKKBN

Samarinda, 1 Februari 2024

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Kalimantan Timur,



Ni Nurani Soravallita, SE, MMT
Pembina Utama Muda
NIP. 19651215 198601 2 002

TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DKP3A PROVINSI KALTIM TAHUN 2019-2023

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Setiap Tahun					Capaian Kinerja Setiap Tahun					Sumber Data
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Kasus KDRT	Persentase kasus korban kekerasan perempuan dan anak provinsi Kaltim yang terselesaikan	%	72,00	74,00	78,00	89,00	90,00	94,49	94,86	75,68	93,58	100,00	PPA
2	Meningkatnya implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan (PPRG)	Persentase perangkat daerah yang menyusun anggaran dan perencanaan yang responsif gender	%	55,00	60,00	65,00	85,00	100,00	29,00	0,00	72,97	86,49	83,78	KG
3	Meningkatnya Layanan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk yang mendapatkan layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	%	97,00	98,00	99,00	100,00	100,00	102,18	98,00	103,69	100,30	99,80	FASYAMINDUK
4	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	3,66	3,67	2,54	2,52	2,50	1,19	3,67	2,09	2,33	1,65	DALDUK
5	Meningkatnya Pemanfaatan data gender dan anak	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender	%	30	35	40	45	50	35	61	80,65	65,00	65,00	SIGA
6	Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparatur sipil negara serta sarana prasarana	Persentase capaian kinerja aparatur sipil negara DKP3A	%	100	100	100	100	100	99,48	80,44	70,00	96,84	96,20	DKP3A

Samarinda, 1 Februari 2024

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Kalimantan Timur,



Hi, Norwan, Soesyalita, SE/MMT

Rambina Utama Muda

NIP. 19651215 198601 2 002



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEPENDUDUKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

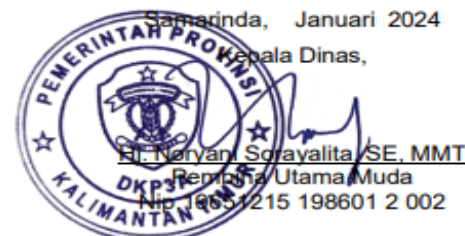
Jalan Dewi Sartika Nomor 13 Telp. (0541) 747481 Fax. (0541) 741405
Pos-el dkp3a@kaltimprov.go.id Laman https://dkp3a.kaltimprov.go.id

RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS KEPENDUDUKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Akuntabel serta Berorientasi Pelayanan Publik yang di Dukung ASN Berakhlak	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	70,50 Poin
2	Meningkatnya upaya penguatan serta pengembangan kapasitas perempuan, masyarakat dan lembaga pemberdayaan perempuan yang berdaya saing bidang politik dan ekonomi	Standarisasi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (Kelembagaan, sumber daya, layanan dan program, pemantauan evaluasi dan pelaporan)	2 Lembaga PEKKA
		Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Perempuan (PEKKA)	400 Orang
3	Meningkatnya perlindungan hak perempuan dan anak terhadap KDRT di Prov. Kaltim	Ratio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	23,46 %
4	Meningkatnya ketersediaan data gender dan anak	Persentase Ketersediaan Data Terpilah Gender dan Anak pada Perangkat Daerah	75 %
5	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Keluarga Berencana	Angka Laju Pertumbuhan Penduduk	2.53 %
6	Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	Persentase Penyajian Data Kependudukan 2 kali dalam 1 tahun	100 %

Samarinda, Januari 2024

Kepala Dinas,



Dr. Neryan Sorayalita, SE, MMT

Rektor Utama Muda

Nip. 19651215 198601 2 002

RENCANA AKSI TAHUN 2023
DINAS KEPENDUDUKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Program	Indikator	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Rencana Aksi	Definisi dari Indikator	Eviden/ Laporan/ Perjanjian Kerjasama/ MoU
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Penguatan Pemenuhan Hak Anak	<ol style="list-style-type: none"> UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2012 tentang perlindungan anak. Perpres No. 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kab/Kota Layak Anak Peraturan Menteri PPPA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak Peraturan Gubernur Nomor 463/K540/2021 tentang Penunjukan 	<ul style="list-style-type: none"> Belum semua Kabupaten/Kota memiliki Perda/Perwali/Perbup dalam kelembagaan untuk Pelaksanaan KLA di Kab/Kota setempat. Masih kurangnya koordinasi & Sinkronisasi dalam penyelenggaraan RAD KLA di Kab/Kota. Kurangnya Pemenuhan dukungan sarana dan prasarana yang ramah anak dalam pemenuhan Hak Anak dan anggaran di daerah yang belum cukup mendukung pelayanan program-program KLA di setiap OPD yang terkait dalam perwujudan pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak. Belum Optimalnya Advokasi, Fasilitasi, Sinkronisasi, & Edukasi dalam penyelenggaraan KLA di Kab/Kota & Provinsi. 	<ol style="list-style-type: none"> Mewujudkan Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur menjadi Kab/Kota yang Layak Anak dalam kategori KLA untuk Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak. Mendukung Program-Program/Upaya-Upaya Kementrian PPPA dalam Standarisasi Infrastruktur Ramah Anak Perlibatan Pemerintah, Media Massa, Dunia Usaha, Masyarakat dalam mewujudkan PHA & perlindungan Anak. Optimalisasi Advokasi, Sosialisasi, Edukasi, dan Pemantauan serta 	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang merujuk pada konsep pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak dalam Konvensi Hak Anak (KHA). Kebijakan KLA bertujuan untuk mendorong terwujudnya sistem pembangunan berbasis hak anak di tingkat kabupaten/kota. Tahapan pengukuran KLA dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi KLA oleh Kemen PPPA dengan melibatkan beberapa pihak terkait secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. KLA diharapkan dapat mendorong tersedianya peraturan daerah/kebijakan yang dapat mendukung upaya pencegahan, penyediaan layanan, penguatan dan pengembangan lembaga termasuk anggarannya Dalam optimalisasi implementasi Peraturan tersebut perlu dibuat peraturan yang bersifat operasional di daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Hasil evaluasi KLA

Program	Indikator	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Rencana Aksi	Definisi dari Indikator	Eviden/ Laporan/ Perjanjian Kerjasama/ MoU
		5. Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak yang tertuang dalam 5 Klaster dalam sistematika KLA	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan dan evaluasi pemenuhan hak anak & perlindungan anak bisa maksimal karena kemampuan anggaran dan SDM. 	Evaluasi dalam pelaksanaan upaya-upaya Pemenuhan Hak Anak & Perlindungan Anak.		
PROGRAM PENCATAT AN SIPIL	Kebijakan terkait pencatatan sipil				<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Pemenuhan Dokumen Pencatatan Sipil berupa Akta Kelahiran Anak di Kab/Kota se Kaltim • Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut : • Pesentase Kepemi-likan Akta Kelahiran = Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Kab/Kota se Kaltim dibagi jumlah anak usia 0 s.d 17 tahun di kab/kota se kaltim dikali 100 • Setiap tahun dilakukan penilaian oleh Kemendagri terkait target capaian kepemilikan akta kelahiran anak ini dan Alhamdulillah setiap tahunnya Provinsi Kaltim capaiannya melampaui target nasional (data capaian terlampir) 	Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) terkait permintaan data kependudukan, catatan sipil

Program	Indikator	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Rencana Aksi	Definisi dari Indikator	Eviden/ Laporan/ Perjanjian Kerjasama/ MoU
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kebijakan terkait dengan pendaftaran penduduk	Tingginya Kesadaran Masyarakat tentang Pentingnya Kepemilikan KTP, KIA dan Kartu Keluarga sebagai wujud pemenuhan hak sipil dan mewujudkan Akurasi Data Kependudukan	Rendahnya kesadaran Masyarakat akan pentingnya kepemilikan KTP, KIA dan Kartu Keluarga sehingga cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk belum maksimal sehingga akurasi data kependudukan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi reel di daerah		<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Pemenuhan Dokumen Pendaftaran Penduduk : • Persentase Kepemilikan KTP-el di Kab/Kota se Kaltim. <p>Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Penduduk Kab/Kota se Kaltim yang memiliki KTP-el dibagi dengan jumlah wajib KTP-el di Kab/Kota se Kaltim dikali 100 • Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kab/Kota se Kaltim. <p>Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Anak di Kab/Kota se Kaltim yang memiliki KIA dibagi dengan jumlah anak usia 0 – 16 tahun di Kab/Kota se Kaltim dikali 100 • Setiap tahun dilakukan penilaian oleh Kemendagri terkait target capaian kepemilikan KTP el dan KIA ini dan Alhamdulillah setiap tahunnya Provinsi Kaltim capaiannya melampaui target nasional (data capaian terlampir) 	Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) terkait permintaan data kependudukan, catatan sipil

Program	Indikator	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Rencana Aksi	Definisi dari Indikator	Eviden/ Laporan/ Perjanjian Kerjasama/ MoU
<p>PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</p>	<p>Implementasi Kelembagaan PUG</p>	<p>1. Adanya regulasi baik pusat dan daerah yang mendukung implementasi PUG. 2. Provinsi dan Kab/Kota telah berupaya untuk memenuhi prasyarat PUG .(Kelembagaan : Pokja PUG, Tim Pengerak PUG, Tim Teknis dan Focal point PUG) 3. Adanya evaluasi dan pemantauan implemntasi PUG dari KPPA dengan memberikan Penghargaan berupa Anugerah Parahita Eka Praya (APE) 4. Target Pimpinan Daerah (Gubernur) dengan menetapkan"berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berahlak mulia</p>	<p>1. Komitmen Pimpinan belum optimal dalam mengimplemntasikan gender pada setiap urusan pembangunan baik provisni maupun kab/kota 2. Belum terinternalisasinya proses data pilah dalam setiap sektor sehingga penentuan kebijakan tidak melakukan analisa kesenjangan 3. Budaya Patriarki yang melembaga dalam kehidupan masyarakat sehingga munculnya ketidaksetaraan perempuan dan laki-laki dalam peran pembangunan</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat perubahan di beberapa regulasi terkait perencanaan dan penganggaran (mis Permendagri 90 tahun 20219) sehingga perlu dilakukan perubahan Perda atau Pergub sebagai indikator. • Dalam melaksanakan implemetasi PUG terdapat 7 (tujuh) prasyarat yaitu Komitmen, Kebijakan, Kelembagaan, Sumber daya, data alat analisis dan partisipasi. Prasyarat ini dalam alur kerja pengarusutamaan gender sekaligus menjadi kerangka input yang harus dibangun dalam implementasi PUG. Berdasarkan kerangka ini, akan muncul keluaran-keluaran yang berkontribusi kepada meningkat dan menguatnya KKG. Sebagaimana uraian prasyarat pengarusutamaan Gender (Uraian terlampir) • Keberhasilan Implementasi PUG di daerah menjadi bagian penilaian dalam pemberian penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) yang diberikan kepada daerah dan komitmen daerah dinilai dari adanya Kebijakan yang dibuat didaerah. • Dalam optimalisasi implementasi Peraturan tersebut perlu dibuat peraturan yang bersifat operasional di daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Draft SK Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengurustamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah</i>

Program	Indikator	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Rencana Aksi	Definisi dari Indikator	Eviden/ Laporan/ Perjanjian Kerjasama/ MoU
		<p>dan berdaya saing terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas. 5. Partisipasi dari perguruan tinggi mengimplentasikan PUG di lingkungan Akademisi (Universitas) seluruh kab/kota se kaltim</p>				

Program	Indikator	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Rencana Aksi	Definisi dari Indikator	Eviden/ Laporan/ Perjanjian Kerjasama/ MoU
<p>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</p>	<p>Kebijakan terkait pengelolaan administrasi kependudukan</p>	<p>Ketepatan Waktu rilis Data Kependudukan Bersih (DKB) persemester oleh Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil menjadi satu-satunya data yang digunakan untuk semua kepentingan : perencanaan pembangunan, pelayanan publik, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan pencegahan kriminal</p>	<p>Data Kependudukan Bersih (DKB) per semester yang dirilis oleh Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil tidak tepat waktu sehingga aplikasi e infoduk, buku data penduduk persemester dan Profil Perkembangan Kependudukan menjadi terlambat penyajiannya. Faktor Penghambat : Rendahnya kesadaran Masyarakat akan pentingnya kepemilikan akta pencatatan sipil sehingga cakupan kepemilikan Akta pencatatan sipil belum maksimal dan akurasi data kependudukan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi reel di daerah</p>			<p>Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) terkait permintaan data kependudukan, catatan sipil</p>

Program	Indikator	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Rencana Aksi	Definisi dari Indikator	Eviden/ Laporan/ Perjanjian Kerjasama/ MoU
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Capaian Data Gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan berdasarkan Data Pilah	Selalu memberikan pendampingan dan bimbingan kepada perangkat daerah dalam membuat laporan data terpilah	Kurangnya kesadaran dan disiplin perangkat daerah dalam memberikan data secara terpilah			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kesesuaian persyaratan dengan jenis pelayanannya, Kemudahan prosedur pelayanan, Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan, Kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan, Kesopanan dan keramahan petugas dalam pelayanan dan Kualitas sarana dan prasarana	Kurangan SDM dalam pelayanan serta sarana dan prasarana			

Program	Indikator	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Rencana Aksi	Definisi dari Indikator	Eviden/ Laporan/ Perjanjian Kerjasama/ MoU
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	persentase peserta yang mengikuti Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya beberapa regulasi ttg perlindungan anak 2. Partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan komunikasi, Informasi dan edukasi KIE perlindungan anak. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya angka perkawinan usia anak dan kekerasan pada anak 2. Pertumbuhan dan kepadatan penduduk 3. Rendahnya tingkat ekonomi dan income masyarakat. 4. Budaya yang ada di dalam masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak 2. Melaksanakan arahan presiden RI tentang pencegahan kekerasan terhadap anak dan pencegahan perkawinan usia anak dengan melaksanakan mengikuti kegiatan komunikasi, Informasi dan edukasi KIE perlindungan anak di 10 Kab/Kota. 		<ul style="list-style-type: none"> • Draft SK Gubernur Kalimantan Timur tentang pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kebijakan Perlindungan Perempuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya beberapa peraturan perundang-undangan terkait Perlindungan perempuan 2. Kesadaran masyarakat dan hasil 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Msh rendahnya upaya pencegahan terhadap pemahaman kekerasan dan diskriminasi perempuan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kegiatan Rapat Evaluasi Program Perlindungan Perempuan. 2. Pelaksanaan kegiatan FGD Program 		SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor 463/K.596/2022 tentang pengangkatan pengurus pusat informasi dan

Program	Indikator	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Rencana Aksi	Definisi dari Indikator	Eviden/ Laporan/ Perjanjian Kerjasama/ MoU
		sosialisasi di media elektronik		<p>Perlindungan Perempuan.</p> <p>3. Hasil dari 2 kegiatan tsb, telah diterbitkan Surat Gubernur Kaltim ke Bupati/Walikota No. 463/147/III/DKP3A/2022 tgl 3 Agustus 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan</p> <p>4. Dalam rangka mendukung misi gubernur bagi penyandang disabilitas, telah diterbitkan Keputusan Gubernur Kaltim no. 463/K.596/2022 tentang Pengangkatan Pengurus Pusat Informasi dan Konsultasi Perempuan Penyandang Disabilitas Tahun 2022 - 2026.</p>		konsultasi bagi perempuan penyandang disabilitas Prov. Kalimantan Timur Tahun 2022-2026

Program	Indikator	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Rencana Aksi	Definisi dari Indikator	Eviden/ Laporan/ Perjanjian Kerjasama/ MoU
				<p>5. PKS antara DKP3A Prov. Kaltim dengan Ikatan Psikolog Klinis Wilayah Kaltim No. 230/997/VII/DKP3A/2022 dan No. 069/IPK Indonesia Kaltim/XI/2022 tentang Pendampingan Psikolog Terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak di UPTD PPA Prov. Kaltim.</p> <p>6. PKS antara DKP3A Prov. Kaltim dengan Dinas PPPA Prov. Kalsel tentang Kerjasama Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang. (Pembahasan PKS ini telah dilakukan sejak tahun 2022 dan saat ini sedang dilakukan</p>		

Program	Indikator	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Rencana Aksi	Definisi dari Indikator	Eviden/ Laporan/ Perjanjian Kerjasama/ MoU
				penomoran PKS dari BPOD Prov. Kalsel).		
PROGRAM PEMBERDA YAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA A (KS)	Peningkatan SDM Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terbitnya Peraturan Gubernur No.2 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagai dasar mewujudkan pemahaman SDM ketahanan keluarga.	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang ketahanan keluarga		<ul style="list-style-type: none"> • Undang – undang Nomor 52 Tahun 2009 bahwa konsep Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan • pembangunan ketahanan keluarga merupakan modal pelaksanaan pembangunan dan potensi bagi peningkatan pembangunan di segala bidang. Ketahanan keluarga dapat mewujudkan kehidupan berbangsa yang lebih baik serta dapat melahirkan generasi bangsa yang lebih matang dan berkualitas. 	SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga Laporan Akhir Kegiatan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Program	Indikator	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Rencana Aksi	Definisi dari Indikator	Eviden/ Laporan/ Perjanjian Kerjasama/ MoU
					<ul style="list-style-type: none"> • penyelenggaraan ketahanan keluarga menjadi penting karena ketidakmampuan keluarga dalam menjalankan fungsinya akan menimbulkan berbagai persoalan yang akhirnya akan menjadi masalah dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks pembangunan ketahanan keluarga, dia menegaskan perlu diperkuat dalam sebuah rumusan kebijakan yang terstruktur berupa peraturan daerah 	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Peningkatan SDM yang mendapatkan KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terbitnya Perpres Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, Terbitnya Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang RAN PASTI.	Masih rendahnya pemahaman tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB)		<ul style="list-style-type: none"> • Sebagaimana Inpres Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas. bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan memberdayakan serta memperkuat institusi keluarga melalui optimalisasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas di setiap desa/kelurahan • Melalui Inpres ini Presiden Jokowi juga memberikan instruksi khusus kepada jajaran terkait, mulai dari Menko PMK, Mendagri, Mendes PDDT, Menteri PPN/Kepala 	Perpres Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, Terbitnya Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang RAN PASTI

Program	Indikator	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Rencana Aksi	Definisi dari Indikator	Eviden/ Laporan/ Perjanjian Kerjasama/ MoU
					<p>Bappenas, Kepala BKKBN, hingga para kepaladaerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan kebijakan dan pengambilan langkah-langkah dalam meningkatkan kualitas keluarga melalui optimalisasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas dilaksanakan secara terintegrasi dankonvergen • Dalam optimalisasi implementasi Peraturan tersebut perlu dibuat peraturan yang bersifat operasional di daerah 	
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Kebijakan tentang pengendalian penduduk	Terbentuknya tim koordinasi pelaksanaan penyusunan GDPK Prov. Kaltim.	Belum terbentuknya GDPK 5 Pilar di Prov. Kaltim sebagai panduan mengintegrasikan variabel demografi/kependudukan dan pembangunan		<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Presiden (Perpres) No 153 Tahun 2014 tentang GDPK. • Secara substansi isi Prepres ini mengamanatkan pada Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) untuk menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK). • penyusunan GDPK, memiliki urgensi lanjutan, yakni menyediakan kerangka pikir dan panduan (road map) untuk mengintegrasikan berbagai variabel kependudukan ke dalam berbagai proses pembangunan 	SK GDPK

Program	Indikator	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Rencana Aksi	Definisi dari Indikator	Eviden/ Laporan/ Perjanjian Kerjasama/ MoU
					<ul style="list-style-type: none"> • Dengan tersusunnya GDPK, diharapkan dapat memperbaiki political will dan komitmen PEMDA terhadap prioritas pembangunan kependudukan, sekaligus mampu meningkatkan kepedulian para policy makers terhadap keterkaitan antara isu kependudukan dengan pembangunan, sebagai suatu kesatuan yang saling berdialektika, berintegrasi, dan bersinergis dalam setiap langkah dan capaian-capaiannya • Dalam optimalisasi implementasi Peraturan tersebut perlu dibuat peraturan yang bersifat operasional di daerah. 	

Kepala Dinas,



Hj. Noryani Sorayalita, ST, MMT
Pembina Utama Muda
NIP. 19651212 198601 2 002

CASCADING KINERJA DKP3A PROV. KALTIM

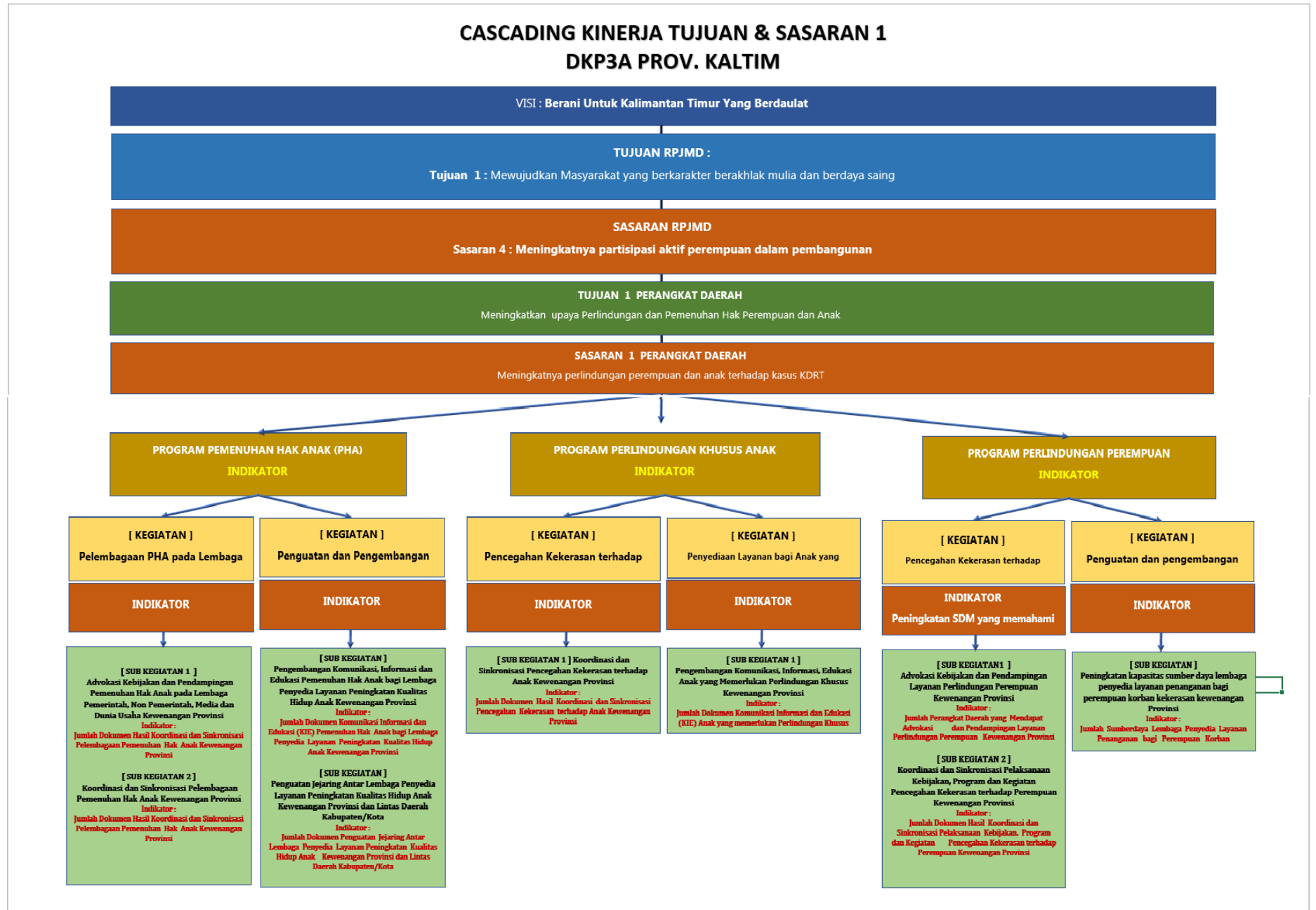
VISI : Berani Untuk Kalimantan Timur Yang Berdaulat
MISI 1 : Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya manusia yang berakhlak mulia dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan Pemuda dan Penyandang Disabilitas

TUJUAN RPJMD :
Tujuan 1 : Mewujudkan Masyarakat yang berkarakter berakhlak mulia dan berdaya saing
INDIKATOR TUJUAN RPJMD :

SASARAN RPJMD
Sasaran 4 : Meningkatkan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan
INDIKATOR SASARAN RPJMD



CASCADING KINERJA TUJUAN & SASARAN 1 DKP3A PROV. KALTIM



CASCADING KINERJA TUJUAN & SASARAN 2 & 3 DKP3A PROV. KALTIM

